

# HARUSKAH KITA TAKLUK KEPADA PEMERINTAH?

Dr. Paskalis Edwin I Nyoman Paska<sup>1</sup>

## Abstrak

Surat Rasul Paulus kepada umat di Roma (Rm.13:1-7) mengharuskan jemaat kristiani untuk takluk kepada pemerintah, karena pemerintah itu ditetapkan oleh Allah. Sikap takluk kepada pemerintah harus mereka tunjukkan bukan saja dengan tidak melawan pemerintah, melainkan juga dengan berbuat baik dan membayar pajak. Sejauh mereka berbuat baik, mereka tidak perlu takut kepada pemerintah. Nasihat Paulus ini bukanlah sebuah dogma, suatu doktrin yang harus diikuti lurus-lurus, melainkan sebuah nasihat pastoral untuk jemaat tertentu, jemaat di Roma, yang berada dalam situasi tertentu. Dengan kata lain Rm. 13:1-7 tidak meminta kita takluk secara membabi buta kepada pemerintah dan kehilangan sikap kritis terutama terhadap pemerintah yang lalim. Jemaat kristiani perlu mendengarkan suara hatinya untuk melihat apakah pemerintah yang ada merupakan pemerintah yang pantas disebut pemerintah yang ditetapkan oleh Allah.

## Kata-kata kunci

Takluk, ketetapan, hati nurani, pajak, takut, dogma, nasihat pastoral

## Pengantar

Ketika berbicara tentang bagaimana sebaiknya sikap orang Kristen terhadap pemerintah, orang sering memakai Roma 13:1-7 sebagai acuan. Pemerintah itu berasal dari Allah dan ditetapkan oleh Dia sehingga kita yang ada di bawahnya harus takluk kepadanya, tidak boleh melawan.

---

<sup>1</sup> Penulis adalah ketua prodi STP IPI program pasca sarjana, Malang dan anggota tim inti revisor Perjanjian Lama Terjemahan Baru di Lembaga Alkitab Indonesia.

Namun, bila suatu pemerintahan itu korup dan melakukan tindak kekerasan yang sewenang-wenang, siapa yang tidak akan menyangsikan pemerintahan itu berasal dari Allah? Adakah penguasa yang tidak berasal dari Allah? Jika kita merasa penguasa itu tidak ditetapkan oleh Allah, haruskah kita tunduk kepadanya? Apakah sikap mengakui pemerintah yang seperti itu sebagai suatu yang ditetapkan oleh Tuhan bukan sebuah kekeliruan atau bentuk sikap apatis dan indeferen?

Bagaimana pun juga, nasihat Paulus dalam Roma 13:1-7 perlu dikaji lebih dalam untuk memahami makna yang sebenarnya. Selain melihat konteksnya, kita perlu membandingkannya dengan teks-teks lain yang berbicara tentang pemerintahan yang ditetapkan oleh Tuhan. Kajian ini akan menunjukkan kepada kita bagaimana sebetulnya pemerintahan yang berasal dari Allah dan bagaimana seharusnya sikap kita terhadapnya.

### Takluk kepada pemerintah

Kepada jemaat di Roma, Paulus menulis surat sebagai berikut:

“Tiap-tiap orang harus takluk (*hupotassésthō*) kepada pemerintah (*exousíais*) yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah (*exousía*), yang tidak berasal dari Allah; dan pemerintah-pemerintah yang ada, ditetapkan (*tetagménai*) oleh Allah. Sebab itu barangsiapa melawan (*antitassómenos*) pemerintah (*exousía*), ia melawan (*anthéstēken*) ketetapan Allah dan siapa yang melakukannya (*anhestēkótes*), akan mendatangkan hukuman atas dirinya” (Rm. 13:1-2).

Dalam teks Yunannya ada tiga kata kunci yang perlu mendapat perhatian khusus untuk memahami makna ayat ini: (*exousía*, *tassō*, dan *TheosAllah*). Kata *exousia* dapat berarti otoritas, penguasa yang kongkret, pemerintah di bumi ini. Namun, beberapa penafsir (Cullman, Wink) melihat *exousíais* (bentuk jamak dari *exousía*) di sini mengacu ke penguasa yang abstrak, penguasa yang bukan di bumi ini, melainkan supernatural power atau “angelic power” (lih. Harun 2015, 7). Di sini jelas yang

dimaksud adalah pemerintah di dunia ini, para penguasa atau pejabat-pejabat yang konkret, dan bukan kuasa-kuasa supernatural yang berada di belakang para pejabat itu, mengingat ayat 6-7 menyinggung soal pembayaran pajak.

Kata *tassō* mempunyai arti menetapkan (lih. Kis. 15:2), menentukan, menunjukkan, mengangkat, memerintahkan, mengarahkan. Dalam kedua ayat ini (Rm 13:1-2) kata *tassō* dipakai sebanyak tiga kali. Pertama, dalam bentuk partisipel perfect pasif feminim jamak (*tetagménai*) dengan arti ditetapkan. Kedua, sebagai akar kata dari kata *hupotassō*, yang berarti tunduk, takluk, taat, berada di bawah otoritas) yang dipakai dalam bentuk imperatif presen pasif (*hupotassésthō*) dengan arti medium: menempatkan diri di bawah, harus takluk. Ketiga, sebagai akar kata dari kata *antitassomai*, yang berarti melawan, menentang, yang di sini dipakai dalam bentuk partisiple present medium nominatif maskulin tunggal (*antitassómenos*), dengan arti “barangsiapa melawan”. Kata ini disandingkan dengan kata *anthéstēken* dan *anhestēkótes*, yang berasal dari kata *anthistēmi* dan memiliki arti yang kurang lebih sama, yakni melawan atau menentang.

Berdasarkan pemakaian kata-kata tersebut jelas bagi kita bahwa dalam kedua ayat ini Paulus menasehati jemaat di Roma agar takluk, menempatkan diri di bawah pemerintah atau para pejabat yang di atasnya dan tidak boleh melawan pemerintah yang memimpin mereka.

### Alasan Takluk

Mengapa jemaat di Roma harus takluk kepada pemerintah? Pertama-tama Paulus memberi alasan teologis:

“sebab tidak ada pemerintah, yang tidak berasal dari Allah; dan pemerintah-pemerintah yang ada, ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barangsiapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah dan siapa yang melakukannya, akan mendatangkan hukuman atas dirinya” (Rm. 13:1-2).

Otoritas atau kekuasaan yang dimiliki para pejabat itu berasal dari Allah. Allahlah yang menetapkan pemerintah. Oleh karena itu, melawan pemerintah berarti melawan ketetapan Allah. Logis sekali!

Alasan teologis ini sesuai dengan pandangan tradisional Israel, yang melihat kekuasaan raja berasal dari Allah (lih. Fitzmyer 1993, 667; Harun 2015, 2). Raja hanyalah wakil Allah, sedangkan raja yang sesungguhnya adalah Allah sendiri. Kepada Daud yang berdosa dengan menyalahgunakan kekuasaannya, Tuhan berbicara dengan perantaraan Nabi Natan untuk mengingatkan Daud bahwa diatelah menjadi raja karena pemberian Tuhan, “... Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda...” (2Sam. 12:8). Ketika Raja Zedekia dan rakyat Yehuda ingin memberontak melawan Babel, Tuhan mengingatkan mereka melalui Nabi Yeremia agar jangan melawan Babel karena “Sekarang, Aku menyerahkan segala negeri ini ke dalam tangan hamba-Ku, yakni Nebukadnezar, raja Babel; ..... bangsa dan kerajaan yang tidak mau takluk kepada Nekubadnezar, raja Babel, .... akan Kuhukum dengan pedang, kelaparan, dan penyakit sampar” (Yer. 27:6-8). Pandangan bahwa kekuasaan para pejabat itu berasal dari Yang Ilahi juga dianut oleh dunia Yunani pada zaman Paulus (lih. Keck 2005,314).

Selain alasan teologis, Paulus juga memberikan alasan pragmatis, yakni pemerintah mengabdikan kebaikan dan menghukum kejahatan.

“Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap

pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian dari padanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyangand pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat” (Rm. 13:3-4).

Mengingat peran pemerintah sebagai yang mengembangkan kebaikan, maka orang yang berbuat baik, tidak perlu takut kepada pemerintah. Pemerintah biasanya merumuskan kebaikan-kebaikan yang hendak dibuatnya dalam konstitusi, yang memuat tujuan negara seperti membangun masyarakat yang adil dan makmur, dan lain sebagainya. Namun, berbuat baik yang dimaksudkan oleh Paulus di sini bukanlah sekedar melakukan apa yang dicanangkan oleh pemerintah, tidak melawan kuasa dan peraturan yang dibuatnya, melainkan lebih dari itu, yakni seperti yang antara lain telah ia sebutkan dalam Rm. 12:9-21. Orang kristen diminta melakukan kebenaran dan keadilan, dan terutama kasih.

Alasan mengapa kita tidak perlu takut kepada pemerintah bila berbuat baik diberi dasar teologis: karena ”pemerintah itu hamba (diakonos) Allah untuk kebaikanmu” (ay. 4). Kata “hamba” di sini diterjemahkan dari kata Yunani diakonos. Kata diakonos memiliki pengertian yang berbeda dengan kata doulos, walaupun keduanya biasanya diterjemahkan dengan “hamba” atau “pelayan”. Kata doulos mengacu ke suatu status sosial paling rendah, status sebagai budak, milik orang lain (tuannya). Sedangkan kata diakonos mengacu ke fungsi atau peran sebagai hamba atau pelayan (Stock 1996, 127-128). Peran sebagai pelayan di sini serupa dengan peran pelayan di restoran. Mata seorang pelayan sepenuhnya tertuju kepada klien yang datang ke restoran. Ia tidak peduli dengan kepentingannya sendiri, apakah ia sudah makan atau belum, sebab yang menjadi perhatiannya ialah kepentingan klien. Ia mencari tahu apa yang

dibutuhkan para klien dan mengusahakan tersedianya semua yang mereka butuhkan. Ia sangat peduli dengan kebutuhan klien serta bertindak secara nyata untuk kepentingan mereka. Demikianlah peran pemerintah. Ia berfungsi sebagai hamba yang menyediakan dan membagikan anugerah Allah bagi kebaikan manusia, agar manusia bisa hidup tenang dan tenteram (1Tim. 2:2). Pemerintah ada untuk melayani rakyatnya, agar mereka bisa hidup baik, yakni menikmati keadilan, keselamatan, dan keamanan. Kebaikan rakyat dalam negara demokratis dirumuskan dalam konstitusi, yang menekankan terciptanya masyarakat yang adil, makmur, dan bebas.

Untuk menjamin ketenteraman dan kesejahteraan rakyatnya, pemerintah “menyandang pedang”, memiliki hak, wewenang, dan perangkat untuk menghukum orang yang berbuat jahat, yang melawan pemerintah. Orang-orang yang melakukan kejahatan pantas takut kepada pemerintah, karena sebagai hamba Allah, pemerintah akan membalaskan murka Allah atas mereka. Pemerintah berperan menghukum orang jahat demi kebaikan rakyatnya.

Takluk sesuai Hati Nurani

“Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita” (Rm. 13:5).

Paulus sekali lagi menekankan pentingnya jemaat di Roma takluk kepada pemerintah. Kali ini ia mengatakan bahwa mereka bukan hanya “harus” takluk, melainkan “perlu” (anágkē) takluk. Artinya, mereka harus takluk bukan hanya karena kewajiban, melainkan juga karena kebutuhan. Mereka menaklukkan diri bukan hanya karena takut akan murka Allah yang tidak suka mereka melawan ketetapan-Nya, melainkan juga karena kesadaran mereka, karena dorongan batin. Suara hati mereka mengatakan bahwa Allahlah yang telah menetapkan penguasa-penguasa itu sebagai

pelayan-pelayan-Nya; para pejabat itu menjalankan tugas TUHAN untuk mencapai kebaikan bagi umat-Nya, kendati ada kalanya dengan cara yang tampaknya berlawanan. Oleh karena itu, mereka harus takluk kepada pemerintah, sebagai wujud ketaatan mereka kepada hukum TUHAN.

### Takluk dengan Membayar Pajak

Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak. Karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar: pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai; rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat (Rm. 13:6-7)

Dalam arti tertentu rakyat (orang Kristen) berhutang kepada pemerintah yang mengusahakan kebaikan mereka, seperti menjamin keadilan, keselamatan, dan keamanan, serta menyediakan air, jalan, dan lain sebagainya. Karena itu, mereka wajib membayar pajak, sebagai bentuk tanggung jawab dan salah satu bukti bahwa mereka takluk kepada pemerintah.

Sebelum memberi prinsip umum mengapa orang harus membayar pajak (lih. ayat 7), Paulus memberi motif yang lebih aktual saat itu, yakni “karena yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan (leitourgoi) Allah”. Paulus melihat kekaisaran Romawi berperan besar dalam menyatukan warganya dan menghindari kekacauan dan keterpecahan. Pemerintah adalah alat di tangan Tuhan untuk menyelamatkan dunia, sehingga para pejabat publik (leitourgoi), patut dilihat sebagai pelayan Allah (bdk. Barclay 1986, 261). Sadar atau tidak mereka sedang melaksanakan karya Allah. Nasihat ini penting, mengingat pada waktu itu, sekitar tahun 58, tampaknya ada cukup banyak keberatan dan keluhan tentang pembayaran pajak di Italia (Tacitus, *Annals* 13 [50], lih. Harun 2015, 4).

Akhirnya Paulus mengaitkan kewajiban membayar pajak dengan prinsip moral umum: “Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar” (ay.7a). Dengan kata lain, berikan kepada orang apa yang menjadi haknya; hutang harus dibayar (ay.8). Apakah yang harus mereka bayar?

Pertama: pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai. Prinsip ini serupa dengan jawaban Yesus ketika Ia ditanya soal boleh tidaknya membayar pajak kepada Kaisar: “Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah!” (Luk. 20:25).

Ada banyak macam pajak yang harus dibayar warganegara kepada pemerintah, misalnya pajak tanah, pajak pendapatan, dan pajak golongan. Adapun yang dimaksud dengan cukai adalah pajak atau bea yang dikenakan untuk eksport-import, pemakaian jembatan, pelabuhan, dan sebagainya. Bagaimana pun kelakuan sikap pemerintah atau pejabat setempat, entah menyakitkan atau tidak, orang Kristen harus membayar pajak dan cukai.

Kedua, “rasa takut (phobos) kepada (orang) yang berhak menerima rasa takut dan hormat (timē) kepada (orang) yang berhak menerima hormat”. Istilah “takut” dalam Alkitab umumnya dikenakan untuk TUHAN, bahkan ungkapan “takut akan TUHAN” (yir’at adonai) sudah menjadi terminus teknikus terutama dalam kitab-kitab Kebijaksanaan. Makna takut di sini bukan sekedar takut, tetapi mengandung makna hormat dan kagum. Dalam Perjanjian Baru pun kata takut (phobos) lazimnya juga ditujukan untuk Tuhan. Mungkin di sini Paulus bermaksud menunjukkan perbedaan tingkat makna takut dan hormat dan sekaligus mau menekankan bahwa rasa takut patut ditujukan kepada TUHAN dan rasa hormat kepada



pemerintah. Bukankah dalam ayat 3 sudah ia katakan bahwa kita, orang yang berbuat baik, tidak perlu takut kepada pemerintah. Selain itu 1Ptr. 2:17 juga membedakan dua hal ini: “takutlah akan Allah, hormatilah raja!” Jika demikian, maka nasihat Paulus ini paralel dengan jawaban Yesus dalam Luk. 20:25, tentang membayar pajak (lih. Harun 2015, 4-5).

#### Orang Kristen dan Pemerintah Dewasa ini

Rm. 13:1-7 menegaskan bahwa pejabat-pejabat pemerintah itu ditetapkan oleh Allah, sehingga orang Kristen harus takluk kepadanya dan tidak boleh melawannya. Mereka harus dihormati sebagai pelayan Allah demi kebaikan bersama. Nasihat untuk bersikap positif terhadap pemerintah yang serupa dengan itu bisa kita baca dalam 1Tim. 2:1-3; Tit.

3:1-2; dan 1Ptr. 2:13-17. Sikap tunduk kepada pemerintah jelas sekali dalam Tit. 3:1 (“Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik”) dan 1Ptr. 2:13-14 (“Tunduklah, karena Allah, kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutus untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik.”)

Apakah orang Kristen dewasa ini mengikuti nasihat Paulus lurus-lurus seperti itu? Bagaimana kita bisa yakin bahwa para pejabat itu ditentukan oleh Allah? Mengingat Rm. 13:1-7 sering dipakai oleh penguasa kristiani yang lalim untuk memaksa rakyatnya takluk kepada mereka, tidak mengherankan bahwa banyak yang menolak untuk memakai Rm. 13:1-7 sebagai landasan dalam bersikap terhadap pemerintah dewasa ini. Ada yang mengatakan nasihat itu hanyalah interpolasi (lih. Harun 2015, 6). Maksudnya, Rm. 13:1-7 hanyalah tambahan pada surat Paulus di

kemudian hari dan bukan dari Paulus karena tidak sesuai dengan pandangan kritis Paulus terhadap penguasa-penguasa seperti yang diungkapkan dalam 1Tes. 5:2-11; 1Kor. 15:24-26. Namun, kajian tentang konteks teks ini sulit membenarkan argumen itu (lih. Ftzmyer 1993, 664).

Ada pula yang menganggap nasihat ini relevan hanya untuk situasi zaman itu, bukan dewasa ini. Paulus memberi nasihat ini karena ia tidak begitu suka dengan sikap orang Yahudi terhadap pemerintahan Romawi pada waktu itu. Kelompok tertentu, seperti kaum Zelot misalnya, suka memberontak dan menebar teror. Mereka menentang pemerintahan sipil dan berusaha menghancurkan dengan perlawanan senjata, karena bagi mereka tidak ada raja selain Allah. Mereka tidak suka orang Yahudi membayar upeti kepada Roma karena satu-satunya yang layak menerima upeti hanya TUHAN. Mereka bahkan tidak segan membakar rumah atau membunuh orang yang membayar upeti kepada Roma. Namun, situasi dewasa ini berbeda. Sistem pemerintahan bukan lagi teokratis melainkan demokratis.

Yang lain mengatakan bahwa Paulus menasihati umat Kristen seperti itu karena pemerintahan Roma belum menganiaya orang Kristen. Paulus berkali-kali mendapat perlindungan dari pemerintahan Romawi dari serangan orang Yahudi. Karena itu, pemerintahan Romawi merupakan suatu keuntungan bagi orang Kristen. Jika memang demikian, mengapa teks ini tetap dipakai oleh orang Kristen awali ketika mereka mendapat penganiayaan dari pemerintah? Sepertinya sudah menjadi sikap umum Gereja awali: taat dan mendoakan pemerintah. Mengapa nada serupa kita temukan pula dalam Liber Apologeticus, karya Yustinus Martir (103-165)? Apakah memang nasihat ini tidak relevan untuk dewasa ini, di mana warganegara ikut aktif dalam kehidupan berpolitik? Bukankah keterlibatan

dalam berpolitik berarti pula mengkritik dan menentang pemerintah yang dianggap tidak benar?

Senada dengan itu, namun memandang konteks dari sudut pandang berbeda, Dr. Liem Khiem (dalam Sinaga 2007, 116-120), menyarankan agar teks ini dimengerti sebagai nasihat pastoral yang menekankan dimensi personal dan kolektif dari kehidupan bergereja (lih. Lakawa 2015, 21) Para pejabat pemerintah yang dibicarakan di sini adalah para pejabat pemerintah tertentu bukan pemerintah sebagai sebuah entitas politik. Konteks perikop ini adalah kembalinya orang Yahudi ke kota Roma. Sebelumnya, mereka diusir oleh Kaisar Klaudius karena kericuhan yang terjadi antara orang Yahudi yang Kristen dan non Kristen merusak ketenteraman kekaisarannya. Ketika orang Yahudi kembali lagi ke Roma, setelah kematian Klaudius, terjadi lagi ketegangan, tetapi kali ini ketegangan dalam Gereja sendiri, yakni ketegangan antara orang-orang Kristen Yahudi dan Kristen non-Yahudi. Ketegangan antar etnis ini menimbulkan ketakutan jangan-jangan pejabat Romawi mengusir mereka lagi. Oleh karena itu, Paulus menulis surat Roma 13:1-7 ini, meminta mereka takluk kepada pemerintah (Sinaga 2007, 118). Dengan kata lain, ajakan dalam Roma 13:1-7 “bukanlah ajaran umum tentang hubungan jemaat dengan Negara, melainkan nasihat khusus untuk situasi ketegangan intern sebuah jemaat, disertai ketakutan jemaat itu terhadap intervensi baru penguasa Roma” (Harun 2015, 8).

Lakawa (2015, 21-22) yang merefleksikan lebih jauh pandangan Dr. Liem Khiem, melihat bahwa rasa takut yang dimaksud oleh Paulus dalam Roma 13:1-7 ini bukanlah pertama-tama rasa takut akan intervensi pemerintah, para pejabat yang menjaga ketertiban ruang publik, melainkan takut akan terjadinya perpecahan dalam jemaat Kristen. Artinya, bukan

“takut” dalam dimensi politis, melainkan pastoral, takut umat Kristen tidak dapat menyikapi perbedaan secara benar. Namun, analisa teks menunjukkan bahwa objek “takut” di sini sebenarnya cukup jelas, yakni pemerintah.

Berbagai argumen diajukan untuk mendamaikan ketegangan antara isi surat Paulus yang sepertinya mewajibkan orang Kristen untuk tunduk kepada pemerintah, dan di lain pihak perlunya orang Kristen kritis bahkan kalau perlu melawan pemerintah. Alkitab dan sejarah menunjukkan betapa sering terjadi perlawanan terhadap pemerintah. Apakah perlawanan seperti itu dianggap melawan ketetapan Tuhan?

#### Nasihat Pastoral

Perlu diingat teks ini bukanlah sebuah dogma, bukan pula semacam manual untuk diikuti lurus-lurus, melainkan sebuah nasihat pastoral untuk menanggapi situasi kongkrit yang dihadapi umat. Yang terpenting tentulah makna dan semangat inti yang ada di dalamnya dan perlu kearifan dalam menerapkannya pada situasi kongkrit dewasa ini.

Pertama, harus disadari bahwa teks ini memang mengatakan kita harus takluk (*hupotasso*), tetapi bukan menaati (*hupakouō*), secara mutlak dalam segala hal, apalagi menaati secara membabi buta. Kita diminta memakai hati nurani, bukan bertindak seperti robot. Kita takluk atau menuruti pemerintah bukan hanya karena mereka telah mengatakan demikian, melainkan karena suara hati kita membenarkannya. Banyak tokoh dalam Kitab Suci menunjukkan perlawanan terhadap pemerintah dan mereka tidak dianggap melawan ketetapan Allah.

Sebut saja Musa, misalnya. Ia membunuh orang Mesir yang memukul seorang Ibrani yang sedang menjalani kerja paksa (Kel. 2:11-12).

Ia juga menentang Firaun yang tidak mengizinkan Israel keluar dari Mesir untuk mempersembahkan kurban bagi Tuhan. Begitu juga Daud, para rasul, termasuk Paulus, dan para martir di Roma yang pada waktu tertentu menunjukkan perlawanan atau menentang perintah pejabat. Apakah tindakan mereka harus kita kategorikan melawan ketetapan Allah?

Para pejabat pemerintah mendapat kuasa dari Allah untuk kebaikan orang yang dipimpinnya. Kebaikan-kebaikan itu biasanya tertuang dalam konstitusi, yang menjamin perlindungan dan keamanan warga negara. Karena itu, pemerintah harus taat kepada konstitusi, sebagai tanda bahwa ia ditetapkan oleh Allah. Jika dia tidak taat kepada konstitusi, tentu bisa diragukan apakah ia benar-benar ditetapkan oleh Allah. Dalam hal ini kita memiliki hati nurani untuk bisa menilai apakah pemerintah melakukan sesuatu yang sesuai dengan kehendak Allah yang menetapkannya. Misalnya kalau pemerintah mengizinkan aborsi menginjak-injak kebebasan beragama, seharusnya hatinurani kita tahu apakah ia benar atau tidak. Hati nurani selalu perlu diluruskan agar tidak sesat, dan diresapi Firman Tuhan, sehingga ingat bahwa “Kita harus lebih taat kepada Allah daripada manusia” (Kis. 5:29).

Kekuasaan itu bukan tanpa batas

Kekuasaan yang dimiliki pemerintah bukanlah kekuasaan tanpa batas. Kekuasaan itu terbatas baik dari segi waktu maupun ruang lingkungannya. Pemerintah ditetapkan oleh Allah bukan untuk selamanya. Allah yang menetapkan atau mengangkat raja, bisa pula memecatnya (Dan. 2:21), ketika ia bertindak tidak sesuai dengan kehendak Allah. Seorang pemimpin atau raja harus ingat bahwa TUHANlah raja semesta alam, sedangkan raja-raja atau pemimpin-pemimpin yang lain hanyalah alat di tangan Tuhan. Itulah sebabnya mengapa Allah sangat

marah dan menghukum Raja Asyur yang menyombongkan diri (lih. Yes 10:12). Raja Asyur lupa bahwa dia sebenarnya hanyalah alat atau kapak di tangan Tuhan untuk menghukum Israel: “Adakah kapak memegahkan diri terhadap orang yang memakainya, atau gergaji membesarkan diri terhadap orang yang mempergunakannya? seolah-olah gada menggerakkan orang yang mengangkatnya, dan seolah-olah tongkat mengangkat orangnya yang bukan kayu!” (Yes. 10:15).

Meski tidak diungkapkan secara eksplisit dalam perikop ini, Paulus yang mengerti dengan baik tradisi Yahudi maupun Yunani, tentu tidak ingin mengatakan bahwa penguasa boleh bertindak sesuka hatinya, dan apa pun yang ia buat harus tetap ditaati. Bagaimana pun juga, seorang penguasa hanyalah alat di tangan TUHAN, yang sewaktu-waktu bisa mencabut ketetapan-Nya. Kekuasaan seorang penguasa bukan tanpa batas dan tidak dijamin selamanya. Tuhan yang mahakuasa sendiri menunjukkan bahwa kemahakuasaannya itu ada dalam “tahu batas”. Dia menciptakan Sabat untuk menunjukkan segala kuasa ada batasnya. Hal ini dinyatakan-Nya dengan jelas sekali ketika ia meminta orang Israel agar jangan melewati batas ketika hendak mengadakan perjanjian dengan Israel di Sinai (Kel. 19:12). Seorang raja diberi hak oleh Tuhan untuk mengambil (1Sam. 8:11-22). Ketika Saul melanggar batas kekuasaannya, kerajaannya pun dicabut (1Sam 13:9-14). Begitu juga Daud, ketika ia mengambil tanpa tahu batas, mengambil tanpa belaskasihan, yakni mengambil Batsyeba, istri Uria (2Sam 11-12). Jadi, pemerintah tidak memiliki otoritas yang tidak terbatas untuk melakukan apapun yang mereka inginkan tanpa perlawanan. Otoritas seseorang dapat dianggap sebagai ditetapkan oleh Allah sejauh orang itu tidak melanggar batas kekuasaannya, melampaui wewenangnya, atau menyalahgunakan kekuasaannya. Seorang ayah punya otoritas di rumahnya, namun tidak berarti ia boleh menyalahgunakan kekuasaannya

terhadap istri dan anaknya. Seorang direktur punya otoritas atas pekerjaan bawahannya, namun tidak berarti ia berhak mengontrol semua kehidupan pribadi karyawannya. Seorang pastor punya otoritas di gereja, tapi tidak berarti ia berhak mengontrol bisnis jemaatnya.

## Penutup

Pemerintah yang berkuasa dapat kita pandang sebagai ditetapkan oleh Allah sejauh ia ada untuk kebaikan, melawan kejahatan, dan menegakkan keadilan dan kebenaran, serta berusaha selalu membuat hidup bawahannya damai sejahtera. Dia hanyalah alat di tangan Allah untuk membagikan kebaikan-Nya. Kuasanya terbatas. Karena itu, ketika ia menyalahgunakan kekuasaannya, bertindak tidak tahu batas, ia kehilangan legitimasinya sebagai pemerintah yang ditetapkan Allah. Terhadap pemerintah seperti ini, kita tidak perlu tunduk dan takut untuk menunjukkan perlawanan. Sebaliknya, kalau dia terus mengemban tugasnya dengan baik, kita harus takluk dan menghormatinya, antara lain dengan setia membayar pajak.

## Daftar Pustaka

- Barclay, William. 2007. *Pemahaman Alkitab Setiap Hari Surat Roma*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Borg, Marcus. 1972. "A New Context for Romans XIII". *New Testament Studies* 19.
- Cranfield, C.E.B. 1987. *Romans: A Shorter Commentary*. Edinburgh: T&T Clark.
- Dunn, James D.G. 1988. *Romans 9-16*. Dallas: Word Book.
- End, Th. van den, 2006. *Tafsiran Kitab Roma*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.

- Fitzmyer, Joseph A. 1993. *Romans*, AB 33. New York: Doubleday.
- Harun, Martin. 2015. "Takluk kepada Penguasa sebab Mereka Ditetapkan oleh Allah" (Roma 13:1-7). *Forum Biblika, Jurnal Ilmiah Populer*, No. 28. Jakarta:Lembaga Alkitab Indonesia, 1-12.
- Keck, Leander E. 2005. *Romans*. Nashville: Abingdon Press.
- Septemy E. Lakawa. "Tidak Ada Alasan untuk Takut terhadap Pemerintah" (Roma 13:1-7). *Forum Biblika. Jurnal Ilmiah Populer*, No.28. Jakarta:Lembaga Alkitab Indonesia.
- Sinaga, Martin L. (ed.). 2007. *Menghayati Kalam Dalam Keheningan: Kumpulan Karangan Terpilih Liem Khiem Yang*, Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia.
- Stock, Klemens. 1996. *Il Cammino di Gesù verso Gerusalemme; Marco 8,27 – 10,52*. Roma: Editrice Pontificio Istituto Biblico.